JURNAL MEDIA AKADEMIK (JMA)
Vol.3, No.5 Mei 2025
e-ISSN: 3031-5220; DOI: 10.62281, Hal XX-XX
PT. Media Akademik Publisher
AHU-084213.AH.01.30.Tahun 2023

PENGARUH PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO, UPAH MINIMUM PROVINSI DAN INFLASI DAERAH TERHADAP TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA (TPAK) SE – PULAU SUMATERA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Analisa Data Panel Tahun 2017-2023)

Oleh:

Desi Rahmawati[1]
Asriani[2]
Yulistia Devi[3]

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Alamat: JL. Letkol. H. Endro SuratminSukarame,Bandar Lampung, Lampung(35131).
Korespondensi Penulis: desir6426@gmail.com, asrianimh66@gmail.com, yulistiadevi@radenintan.ac.id

Abstract. *This study aims to determine the Effect of Gross Regional Domestic Product, Provincial Minimum Wage, and Regional Inflation on the Labor Force Participation Rate throughout Sumatra Island in 2017-2023. The data source used was obtained from the Central Statistics Agency (BPS). The type of research used in this study is quantitative descriptive research with secondary data, the method used in this study is panel data regression analysis. The data used in this study is panel data, namely a combination of time series data and regional data (cross section). Data analysis used in this study is by using the E-Views 10 tool. The results of this study indicate that Gross Regional Domestic Product (GRDP) does not affect the Labor Force Participation Rate, Provincial Minimum Wage has a significant positive effect on the Labor Force Participation Rate. While Regional Inflation has no effect on the Labor Force Participation Rate.*

Keywords: *PDRB, UMP, Regional Inflation, TPAK, Shariah Economy.*

Received April 24, 2025; Revised May 05, 2025; May 09, 2025
*Corresponding author: desir6426@gmail.com

PENGARUH PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO, UPAH MINIMUM PROVINSI DAN INFLASI DAERAH TERHADAP TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA (TPAK) SE – PULAU SUMATERA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Analisa Data Panel Tahun 2017-2023)

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Upah Minimum Provinsi, dan Inflasi Daerah terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Se - Pulau sumatera tahun 2017-2023. Sumber data yang digunakan diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Jenis Penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dekskrptif dengan data sekunder, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data penel yaitu gabungan dari data seri waktu (*time series*) dan data wilayah (*cross section*). Analisa data yang digunakan pada penelitian ini yaitu dengan)menggunakan alat bantu E-Views 10. Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Tidak Berpengaruh Terhadap Tingkat Partisipasi Angkata Kerja, Upah Minimum Provinsi Berpengaruh Positif Signifikan Terhadap Tingkat Partisipasi Angkata Kerja. Sedangkan Inflasi Daerah Tidak Berpengaruh Terhadap Tingkat Partisipasi Angkata Kerja.

Kata Kunci: PDRB,UMP, Inflasi Daerah, TPAK, Ekonomi Syariah.

LATAR BELAKANG

Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) merupakan tingkat partisipasi angkatan kerja yang memberikan gambaran kehidupan kerja dalam pekerjaan sehari-hari berdasarkan momen-momen tertentu selama periode survei.[1] TPAK merupakan indikator yang umum digunakan untuk menganalisis partisipasi angkatan kerja. Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) tergantung serapan tenaga kerja atau bisa di sebut sebagai salah satu indikator untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) sendiri merupakan suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari merujuk pada suatu waktu dalam periode survei. Oleh karena itu fokus penulis dalam penelitian ini adalah pada proses pengaruh masalah kependudukan dan ketenagakerjaan terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) dan sangat mempengaruhi inflasi.[2]

[1] Boediono, Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No. 5 Ekonomi Makro, ed (Yogyakarta: BPFE, 2014).
[2] Mulyadi, S. 2003. Ekonomi Sumber Daya Manusia: Dalam Perspektif Pembangunan. Jakarta : PT. Raja Grafindo

Inflasi merupakan suatu kondisi perekonomian yang menunjukkan kecenderungan kenaikan tingkat harga umum (*price level*) dan bersifat terus menerus. Hal ini disebabkan oleh ketidakseimbangan arus barang dan uang yang disebabkan oleh berbagai faktor. Inflasi juga menjadi ukuran penting dalam analisis perekonomian selain pertumbuhan ekonomi, pengangguran, kemiskinan serta impor dan ekspor. Inflasi merupakan masalah yang sangat besar dalam perekonomian suatu negara dan merupakan fenomena moneter yang selalu mengkhawatirkan negara tersebut karena kebijakan yang diambil untuk mengatasi inflasi seringkali menjadi permata ganda yang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Ini termasuk keseimbangan eksternal dan suku bunga. Inflasi atau kenaikan harga barang dan jasa secara umum dapat menurunkan daya beli masyarakat, termasuk masyarakat berpendapatan rendah. Untuk melindungi daya beli pekerja, pemerintah seringkali menaikkan upah minimum seiring dengan inflasi.

Upah minimum adalah kebijakan yang digunakan untuk memastikan bahwa pekerja menerima upah yang adil sekaligus mencegah kemiskinan di antara pekerja, yang mencakup pemenuhan standar hidup pekerja. Selain itu, mendistribusikan kembali penghasilan pekerja pada skala upah yang lebih rendah akan mengurangi dispersi upah dan kemungkinan akan meningkatkan permintaan agregat melalui efek pengganda. Di banyak negara, upah minimum merupakan faktor utama dalam menentukan upah nasional.[3]

Islam merupakan agama terakhir yang diturunkan Allah SWT. Lengkapi agama yang ada. Islam menggunakan Al-Quran dan Hadits sebagai pedoman utamanya untuk mengatur segala sesuatu, termasuk urusan pekerjaan. Islam selalu mengajarkan umatnya untuk berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya. Tidak diperbolehkan bagi umat Islam untuk hanya duduk-duduk saja tanpa mendampingi dirinya dalam berusaha, atau berdoa dan berharap rejeki dari surga. Islam mendorong umatnya untuk bekerja dan memproduksi, bahkan menjadikannya sebagai sebuah kewajiban terhadap orangorang yang mampu, lebih dari itu Allah akan memberi balasan yang setimpal yang sesuai dengan amal atau kerja sesuai dengan fiman Allah dalam Q.S. At – Taubah (9) ayat (105).

Persada.

[3] Amir, A, 2007. Pengaruh inflasi dan pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran di Indonesia. Jurnal Inflasi dan Pengangguran, 1(1).

وَقُلِ اعْمَلُوْا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُوْلُهٗ وَالْمُؤْمِنُوْنَۗ وَسَتُرَدُّوْنَ اِلٰى عٰلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۝١٠٥

wa quli'malû fa sayarallâhu 'amalakum wa rasûluhû wal-mu'minûn, wa saturaddûna ilâ 'âlimil-ghaibi wasy-syahâdati fa yunabbi'ukum bimâ kuntum ta'malûn

Yang artinya; Katakanlah (Nabi Muhammad), "Bekerjalah! Maka, Allah, rasul-Nya, dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Kamu akan dikembalikan kepada (*Zat*) yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu, Dia akan memberitakan kepada kamu apa yang selama ini kamu kerjakan.

Berdasarkan fenomena diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian Tentang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Upah Minimum Provinsi (UMP) Dan Inflasi Daerah Terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Se Pulau Sumatera Dalam Perspektif Ekonomi Islam Periode 2017-2023."

KAJIAN TEORITIS

Teori Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Teori Adam Smith

Teori TPAK pada ekonomi klasik di kemukakan oleh Adam Smith yang menemukan bahwa kemakmuran suatu bangsa meningkat seiring dengan meningkatnya kualitas tenaga kerjanya. Sumber pendapatan utama bagi produksi tenaga kerja dan sumber kekuatan ekonomi bagi. Tinggi atau rendahnya nilai suatu benda bergantung pada keunggulan mutlak nilai benda tersebut. Menurut Adam Smith, keunggulan absolut adalah kemampuan suatu negara untuk menggunakan teknologi dan efisiensi tenaga kerja untuk memproduksi barang. Teorinya, "Teori Nilai Tenaga Kerja", menyatakan bahwa semakin banyak tenaga kerja digunakan, semakin bernilai barang yang diproduksi. Kemakmuran suatu bangsa diukur dari banyaknya barang yang diproduksi, dan proses produksinya memerlukan penyerapan tenaga kerja dalam jumlah besar.[4]

[4] Moch Heru Anggoro, "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Pertumbuhan Angkatan Kerja Terhadap Tingkat Pengangguran Di Kota Surabaya," Jurnal Pendidikan Ekonomi (Jupe) 3, No. 3 (2015).

Toeri Produk Domestik Regional Bruto

Menurut Sadono (2013) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah merupakan nilai dari seluruh barang dan jasa yang diproduksi dalam waktu satu tahun di suatu wilayah tertentu tanpa membedakan kepemilikan faktor produksi, tapi lebih memerlukan keberadaan faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi itu, PDRB merupakan salah satu pencerminan kemajuan ekonomi suatu daerah. Kenaikan PDRB akan menyebabkan pendapatan daerah dari sektor pajak dan retribusi meningkat. Hal tersebut berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli daerah (PAD) di daerah tersebut Salah satu cara untuk melihat kemajuan ekonomi adalah dengan mencermati nilai pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).[5]

Teori Upah Minimum Provinsi

Teori John Stuart Mill22

Mills adalah sosok klasik seorang sarjana yang berpendapat bahwa tingkat gaji juga tidak akan berubah 22 Ibid dari level semula, tetapi karena alasan yang berbeda.

Menurutnya, ada sumber upah di Perusahaan untuk membayar upah. Dunia usaha menawarkan beberapa di antaranya Dana tersebut digunakan untuk membayar gaji. Kapan Investasi telah dilakukan, jumlah sumber daya telah ditentukan. Oleh karena itu, besaran gaji tidak bisa banyak berubah dengan alokasi tersebut. Dari kedua tokoh klasik tersebut dapat disimpulkan adanya pengertian pesimisme bahwa tingkat gaji hanya akan tetap rendah.[6]

Teori Inflasi Daerah

Teori Keynes

Dalam inflasi didasarkan pada teori makro-nya. Inflasi terjadi karena suatu masyarakat ingin hidup diluar batas kemampuan ekonominya (*disposable income*). Hal tersebut diterjemahkan dalam suatu kondisi dimana permintaan masyarakat akan barang melebihi jumlah barang yang tersedia, sehingga muncul inflationary gap. Inflationary gap ini muncul karena masyarakat berhasil menterjemahkan aspirasi mereka menjadi

[5] Aris Soelistyo Dyah Indri Widyapangesti Analisis Pengaruh PDRB, Investasi, Upah Minimum Provinsi Terhada Penyerapan Tenaga Kerja Di Pulau Jawa. Referensi Jurnal Ilmu Ekonomi (JIE) vol 6, No. 1, Februari 2022.

permintaan efektif akan barang-barang. Inflasi akan terus berlangsung selama jumlah permintaan efektif dari masyarakat melebihi jumlah output yang bisa dihasilkan oleh masyarakat. Inflasi baru akan berhenti apabila permintaan efektif total tidak melebihi harga-harga yang berlaku jumlah output tersedia.[7].

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dekskrptif dengan data sekunder, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Regresi Data Panel. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data penel yaitu gabungan dari data seri waktu (*time series*) dan data wilayah (*cross section*). Analisa data yang digunakan pada penelitian ini yaitu dengan)menggunakan alat bantu E-Views 10. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan dan pengaruh antar variable yaitu hubungan pengaruh domestik regional bruto (X1), upah minimum provinsi (X2), inflasi daerah (X3) sebagai variabel independen dan tingkat partisipasi angkatan kerja (Y) sebagai variable dependen dengan melakukan pengumpulan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun periode 2017-2023.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan suatu metode analisis data penelitian yang berfokus pada pengumpulan, penyajian, dan penentuan nilai-nilai statistik dalam format yang mudah dipahami. Berikut ini adalah hasil analisis statistik deskriptif yang telah diproses menggunakan aplikasi Eviews 10.

[7] Ayu Maulidhia Choirunnisa, Rifki Khoirudin. Pengaruh Upah Minimum Provinsi, PDRB, IPM, Jumlah Penduduk, TPAK Terhadap Penanaman Modal Asing Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Volume 1, Nomor 12, July 2024, Halaman 327-334 E-ISSN: 3025-6704.

Tabel 1.1 Hasil Analisis Statistik Deskriptif

	PDRB	UPM	INFLASI	TPAK
Mean	5.231300	6.405825	0.417846	1.825538
Median	5.228982	6.400113	0.389166	1.827369
Maximum	5.779767	6.533221	0.870989	1.861654
Minimum	3.155038	6.239299	-0.050610	1.800236
Std. Dev.	0.455412	0.069553	0.214190	0.014675
Sum Sq. Dev.	9.955214	0.232203	2.202122	0.010336
Observations	49	49	49	49

Sumber: Output Eviews 10 (data diolah, 2025

Hasil uji deskriptif, diketahui bahwa jumlah data yang diambil dalam penelitian ini adalah sejumlah 49. TPAK sebagai variabel dependen memiliki rata-rata (*mean*) sebesar 0.014675 dengan nilai median sebesar 1.827369 dan nilai standar deviasi sebesar 0.014675.

Analisis Model Regresi Panel

Model regresi panel adalah uji model regresi yang lebih besar dari atau sama dengan variabel independen. Dalam studi ini, analisis regresi berganda bertujuan untuk mengenali dampak populasi dan untuk mengakui tingkat pengangguran negara, upah minimum, untuk kemiskinan multidimensi. Hasil regresi data panel dengan model dengan efek tetap pada variabel dalam penelitian ini tercantum dalam tabel berikut;

Tabel 1.2 Hasil Estimasi Regresi Data Panel dengan *Fixed Effect*

Variabel	**Koefisien**	**Std. *Error***	**t-*Statistic***	**Signifikan**
C	1.177794	0.172382	6.832453	0.0000
X1	-0.005421	0.004730	-1.146002	0.2588
X2	0.105129	0.027584	3.811168	0.0005
X3	0.006381	0.005883	1.084679	0.2847

Adjusted R-squared	0.654696
Prob(F-statistic)	0.000000

Sumber: Output Eviews 10 (data diolah, 2025)

Pada tabel diatas dapat diketahui bahwa hasil persamaan regresi data panel yang dilakukan terhadap variabel-variabel penelitian ini, maka persamaan regresinya adalah sebagai berikut:

Y = 70.828513229 + 2.58411441385e-07*X1 - 1.55135945491e-06*X2 + 0.0208352913358*X3

Keterangan:

Y : Tingkat partisipasi angkatan kerja

X1 : PDRB

X2 : Upah Minimum Provinsi

X3 : INFLASI

α : Konstanta atau Intersep (1.177794)

$ß_1$: Koefisien atau *Slope* (-0.005421)

$ß_2$: Koefisien atau *Slope* (0.105129)

$ß_3$: Koefisien atau *Slope* (0.006381)

Nilai konstanta sebesar 1.177794 artinya tanpa adanya vari abel X1, X2, X3, maka variabel Y akan mengalami peningkatan sebesar 1.177794.

Nilai koefisien beta variabel X1 sebesar -0.005421, jika nilai variabel lain konstan dan variabel X1 mengalami peningkatan 1 satuan, maka variabel Y akan mengalami penurunan sebesar 0.005421. Begitupun sebaliknya, jika nilai variabel lain konstan dan variabel X1 mengalami penurunan 1 satuan, maka variabel Y akan mengalami peningkatan sebesar 0.005421.

Nilai koefisien beta variabel X2 sebesar 0.105129, jika nilai variabel lain konstan dan variabel X2 mengalami peningkatan 1 satuan, maka variabel Y mengalami peningkatan sebesar 0.105129. Begitupun sebaliknya, jika nilai variabel lain konstan dan

variabel X2 mengalami penurunan 1 satuan, maka variabel Y akan mengalami penurunan sebesar 0.105129.

Nilai koefisien beta variabel X3 sebesar 0.006381, jika nilai variabel lain konstan dan variabel X3 mengalami peningkatan 1 satuan, maka variabel Y akan mengalami penurunan sebesar 0.006381. Begitu pula sebaliknya, jika nilai variabel lain konstan dan variabel X3 mengalami penurunan 1 satuan maka variabel Y mengalami peningkatan sebesar 0.006381

Pemilihan Teknik Regresi Data Panel

a. UJI CHOW

Tabel 1.3 Hasil dari uji Chow:

Effects Test	***Statistic***	**d.f**	**Prob**
Cross-section F	14.960429	(6,39)	0.0000
Cross-section Chi-Square	58.526019	6	0.0000

Sumber: Output Eviews 10 (data diolah, 2025

Berdasarkan hasil uji Chow dengan menggunakan bantuan *software Eviews* 10, pada tabel diatas dapat diketahui nilai probabilitas *cross-section* F sebesar 0.0000 dan nilai signifikan *cross-section chi-square* lebih kecil dari nilai signifikan α = 0,05 sehingga berdasarkan ketentuan dalam uji chow dapat disimpulkan bahwa model Ho untuk model ini ditolak dan Ha diterima. Dengan hasil tersebut, maka estimasi yang paling tepat untuk digunakan dalam penelitian ini adalah *Fixed Effect* Model.

b. Uji Hausman

Tabel 1.4 Berikut hasil dari uji hausman :

Test Summary	*Chi-Sq. Statistic*	*Chi-Sq*.d.f	Prob

Cross-section random	18.777162	3	0.0003

Sumber: Output Eviews 10 (data diolah, 2025

Berdasarkan hasil uji Hausman, dalam tabel diatas dapat diketahui nilai probabilitas sebesar 0.0003. Nilai ini lebih kecil dari nilai signifikan α = 0,05. Berdasarkan ketentuan uji Hausman, dapat disimpulkan bahwa Ho untuk model ini ditolak dan Ha diterima. Dengan hasil tersebut, maka estimasi yang paling tepat untuk digunakan dalam penelitian ini adalah *Fixed Effect* Model.

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dalam penelitian ini terdiri atas tiga pengujian, yakni uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heterokedastisitas yang semuanya diuji menggunakan perangkan Eviews 10.

a. Hasil Uji Normalitas

Tabel 1.5 Uji Normalitas

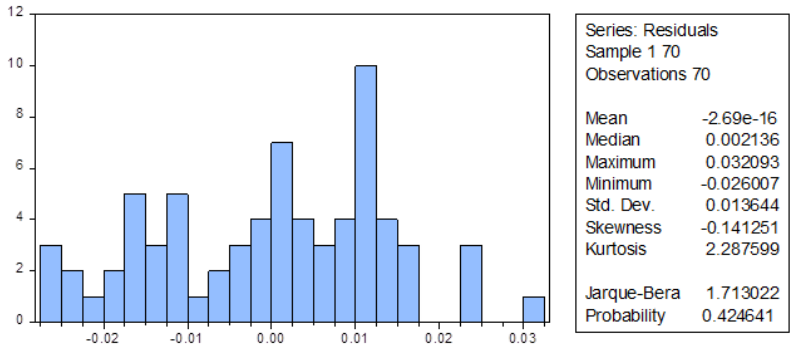

Sumber: Output Eviews 10 (data diolah, 2025).

Berdasarkan gambar hasil olahan data menggunakan program *Eviews 10*, diperoleh hasil bahwa nilai JB (*Jarque Bera*) sebesar 1.713022 dan nilai probabilitas sebesar 0.424641 lebih besar dari α = 5% yakni 0,05, maka dapat disimpulkan residual berdistribusi normal dan model regresi dapat dilakukan untuk pengujian berikutnya.

b. Uji Multikoleniaritas

Tabel 1.6 Tabel uji multikoleniaritas

Variabel	*Centered* VIF
Produk Domestik Regional Bruto	**1.000000**
Upah Minimum Provinsi	**0.309334**
Inflasi Daerah	**0.040227**

Sumber: Output Eviews 10 (data diolah, 2025).

Berdasarkan tabel 4.6, hasil dari uji multikolinearitas menggunakan *Variance Inflation Factor* (VIF) dapat diketahui. Dari perhitungan, nilai VIF untuk semua variabel independen yaitu Produk Domestik Regional Bruto, upah minimum provinsi dan inflasi daerah menunjukkan angka di bawah 10 atau kurang dari 10. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak ada masalah multikolinearitas dalam model regresi ini, dan model regresi yang digunakan dalam penelitian ini terbebas dari multikolinearitas atau lolos uji multikoleniaritas.

c. Uji heterokedasititas

Tabel 1.7 Hasil uji heterokedasititas

Heteroskedasticity Test: Glejser			
F-*statistic*	0.105644	Prob. F (1,5)	0.7583
Obs*R-squared	0.144842	Prob. Chi-Square(1)	0.7035
Scaled explained SS	0.035257	Prob. Chi-Square(1)	0.8511

Sumber: *Output Eviews 10 (data diolah, 2025)*

Berdasarkan informasi dalam Tabel 4.4, dapat dilihat hasil evaluasi heterokedastisitas dengan memanfaatkan uji Glejser. Nilai prob yaitu 0.7583 > 0,05 artinya tidak terjadi masalah heterokedasititas dan memenuhi salah satu syarat asumsi klasik (H0 diteriama). Dengan demikian, model regresi yang diterapkan dalam penelitian ini terbukti bebas dari heterokedastisitas.

Hasil Uji Hipotesis

a. Uji T Parsial (X1)

Tabel 1.8 Hasil Uji T PDRB

Variabel	*Coefficient*	Std.*error*	t-*Statistic*	Prob	Kesimpulan
X1 PDRB	-0.005421	0.004730	-1.146002	0.2588	Terima Ho

Sumber: *Output Eviews 10 (data diolah, 2025)*

Berdasarkan hasil uji T Parsial, diketahui variabel X1 PDRB nilai signifikansi lebih besar dari α = 5% (0,05). Maka Ho diterima dan Ha ditolak, artinya variabel X1 PDRB tidak berpengaruh terhadap TPAK.

b. Uji T Parsial (X2)

Tabel 1.9 Hasil Uji T Upah Minimum Provinsi

Variabel	*Coefficient*	Std.*error*	t-*Statistic*	Prob	Kesimpulan
X2 Upah Minimum Provinsi	0.105129	0.027584	3.811168	0.0005	Tolak Ho

Sumber: *Output Eviews 10 (data diolah, 2025)*

Berdasarkan hasil uji T Parsial, diketahui variabel X2 Upah Minimum Provinsi, nilai signifikansi lebih kecil dari α = 5% (0,05). Maka Ho ditolak dan Ha diterima, artinya variabel X2 Upah Minimum Provinsi berpengaruh signifikan terhadap Tpak.

c. Uji T Parsial (X3)

Tabel 1.10 Hasil Uji T Inflasi Daerah

Variabel	*Coefficient*	Std.*error*	t-*Statistic*	Prob	Kesimpulan

X3 Inflasi Daerah	0.006381	0.005883	1.084679	0.2847	Terima Ho

Sumber: *Output Eviews 10 (data diolah, 2025)*

Berdasarkan hasil uji T Parsial, diketahui variabel X3 Inflasi Daerah, nilai signifikansi lebih besar dari α = 5% (0,05). Maka Ho diterima dan Ha ditolak, artinya variabel X3 Inflasi Daerah Tidak berpengaruh terhadap TPAK.

d. Uji F Simultan

Tabel 1.11 Hasil Uji F (Simultan)

R-squared	0.719441	*Mean dependent var*
Adjusted R-squared	0.654696	*S.D. dependent var*
S.E. of regression	0.008623	*Akaike info criterion*
Sum squared resid	0.002900	*Schwarz criterion*
Log likelihood	168.9762	*Hannan-Quinn criter.*
F-statistic	11.11199	*Durbin-Watson stat*
Prob(F-*statistic*)	**0.000000**	

Sumber: *Output Eviews 10 (data diolah, 2025)*

Berdasarkan hasil uji F dalam tabel diatas, diketahui nilai Probabilitas 0.000000 lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan ketentuan uji Simultan F, maka dapat disimpulkan bahwa variabel PDRB, upah minimum provinsi dan inflasi secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen TPAK.

e. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 1.12 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

R-squared	0.719441	*Mean dependent var*

Adjusted R-squared	**0.654696**	***S.D. dependent var***
S.E. of regression	0.008623	*Akaike info criterion*
Sum squared resid	0.002900	*Schwarz criterion*
Log likelihood	168.9762	*Hannan-Quinn criter.*
F-statistic	11.11199	*Durbin-Watson stat*
Prob(F-statistic)	0.000000	

Berdasarkan hasil uji Koefisien Determinasi (R^2) pada tabel diatas, dapat diketahui nilai *Adjusted R-Squared* sebesar **0.654696** atau 65.46 %, menunjukkan bahwa variabel independen PDRB, Upah Minimum Provinsi Dan Inflasi Daerah mampu menjelaskan variabel dependen TPAK sebesar 65.46 %. Sedangkan 34,54 % sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

Pembahasan Hasil Penelitian

Pengaruh Pdrb Terhadap Tpak Di Provinsi Se-Pulau Sumatera 2017-2023

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap TPAK pada sepuluh provinsi di Pulau Sumatera berdasarkan hasil uji Parsial dengan nilai signifikansi 0.2588. Sedangkan pada hasil regresi, variabel PDRB (X1) menunjukkan hasil negatif. Hal ini dapat diartikan bahwa setiap kenaikan ataupun penurunan jumlah penduduk tidak mempengaruhi TPAK di sepuluh provinsi di Pulau Sumatera. Berdasarkan hasil penelitian terhadap sepuluh provinsi di Pulau Sumatera pada periode 2017 hingga 2023, ditemukan bahwa jumlah penduduk tidak berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Hal ini dibuktikan melalui uji parsial yang menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,2588, jauh di atas ambang batas 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peningkatan atau penurunan jumlah penduduk tidak memberikan dampak yang berarti terhadap perubahan TPAK di wilayah tersebut.

Pengaruh Upah Minimum Provinsi Terhadap Tpak Di Provinsi Se-Pulau Sumatera 2017-2023

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Upah Minimum Provinsi berpengaruh signifikan terhadap tpak di Pulau Sumatera berdasarkan hasil uji Parsial dengan nilai signifikansi 0.0005 . Sedangkan pada hasil regresi, variabel Upah Minimum Provinsi (X2) menunjukkan hasil positif. Hal ini dapat diartikan bahwa setiap terjadi peningkatan pada Upah Minimum Provinsi maka akan turut meningkatkan TPAK di Pulau Sumatera. Kondisi ini menunjukkan bahwa Upah Minimum Provinsi (UMP) memiliki pengaruh signifikan terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Berdasarkan uji parsial, nilai signifikansi yang diperoleh sebesar 0,0005, jauh di bawah batas signifikansi 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa hubungan antara UMP dan TPAK sangat kuat secara statistik.

Pengaruh Inflasi Daerah Terhadap Tpak Di Provinsi Se-Pulau Sumatera 2017-2023

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Inflasi Daerah tidak berpengaruh terhadap TPAK pada sepuluh provinsi di Pulau Sumatera berdasarkan hasil uji Parsial dengan nilai signifikansi 0.2847. Sedangkan pada hasil regresi, variabel Inflasi (X3) menunjukkan hasil POSITIF. Hal ini dapat diartikan bahwa kenaikan inflasi daerah akan mereduksi TPAK secara multidimensi di sepuluh provinsi di Pulau Sumatera. Kondisi ini menunjukkan bahwa inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Berdasarkan hasil uji parsial, nilai signifikansi yang diperoleh sebesar 0,2847, lebih tinggi dari tingkat signifikansi 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa secara statistik, fluktuasi tingkat inflasi tidak berhubungan langsung dengan perubahan TPAK di kawasan tersebut.

Pengaruh Pdrb, Upah Minimum Provinsi, Dan Inflasi DaerahTerhadap Tpak Di Provinsi Se-Pulau Sumatera 2017-2023

Berdasarkan hasil uji signifikansi secara simultan (uji F), diketahui bahwa nilai Prob (F-*Statistic*) bernilai 0.000000 yang berarti bahwa variabel PDRB, upah minimum provinsi, dan INFLASI secara bersama-sama mempengaruhi variabel TPAK. Hal ini dikarenakan TPAK yang tinggi ditentukan oleh beberapa faktor dalam beberapa dimensi yang berkaitan dengan kemampuan seseorang dalam mencapai kesejahteraan dan kualitas

hidup layak, seperti dimensi kesehatan, lapangangan pekerjaan, dan standar hidup. Ketika seorang individu mampu memenuhi kebutuhan hidup sekaligus meningkatkan kualitas hidupnya, maka tpak akan dapat direduksi.

Tinjauan Perspektif Ekonomi Islam Dalam Pengaruh Domestik Regional Bruto, Upah Minimum Provinsi Dan Inflasi Daerah Terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Se-Pulau Sumatera 2017-2023

Berdasarkan hasil uji simultan, dalam Pengaruh Domestik Regional Bruto, Upah Minimum Provinsi Dan Inflasi Daerah Terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Se-Pulau Sumatera 2017-2023 adalah signifikan. PDRB, UPM, dan INFLASI DAERAH dan TPAK sudah di jelaskan dalam islam. Tidak diperbolehkan bagi umat Islam untuk hanya duduk-duduk saja tanpa mendampingi dirinya dalam berusaha, atau berdoa dan berharap rejeki dari surga. Islam merupakan agama terakhir yang diturunkan Allah SWT. Islam menggunakan Al-Quran dan Hadits sebagai pedoman utamanya untuk mengatur segala sesuatu, termasuk urusan pekerjaan. Islam selalu mengajarkan umatnya untuk berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam ekonomi Islam PDRB secara fungsional akan mempengaruhi penerimaan pajak dengan meningkatnya pendapatan pajak, wakaf, zakat, sedekah dan pendapatan lainnya yang akan memberikan dampak baik dikarenakan meningkatnya suatu penerimaan negara, maka makin optilmal pengeluaran negara dalam meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi suatu Negara. Menurut pandangan umat Islam, upah yang benar adalah orangnya siapa yang bekerja dan kewajiban orang yang mempekerjakannya membayar. Dalam Islam dikenal juga dengan istilah ujrah upah setelah Perjanjian Ijarah. Dijelaskan dalam QS Nuh ayat 10-12

فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْۗ اِنَّهٗ كَانَ غَفَّارًاۙ (١٠) يُّرْسِلِ السَّمَاۤءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًاۙ (١١) وَّيُمْدِدْكُمْ بِاَمْوَالٍ وَّبَنِيْنَ وَيَجْعَلْ لَّكُمْ جَنّٰتٍ وَّيَجْعَلْ لَّكُمْ اَنْهٰرًاۗ (١٢)

Artinya: “10. Maka aku katakan kepada mereka: 'Mohonlah ampun kepada Tuhanmu, -sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun, 11. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, 12. Dan membanyakkan harta dan anak-

anakmu, dan Mengadakan untukmu kebun-kebun dan Mengadakan (pula di dalamnya) untukmu sungai-sungai".

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan terkait tujuan penelitian ini, sebagai berikut.

1. Hasil uji (T) Parsial menunjukan bahwa:
    a. PDRB tidak berpengaruh terhadap TPAK di Pulau Sumatera Tahun 2017-2023. Hasil ini tidak sesuai dengan hipotesis yang digunakan dalam penelitian yang menerangkan bahwasanya PDRB berpengaruh terhadap TPAK.
    b. Upah Minimum Provinsi berpengaruh positif signifikan terhadap TPAK di Pulau Sumatera Tahun 2017-2023. Hasil ini sesuai dengan hipotesis yang digunakan dalam penelitian, yang menjelaskan Upah Minimum Provinsi berpengaruh terhadap TPAK.
    c. Inflasi Daerah tidak berpengaruh terhadap TPAK di Pulau Sumatera Tahun 2017 2023. Hasil ini sesuai dengan hipotesis yang digunakan dalam penelitian, dimana kenaikan Inflasi tidak berpengaruh terhadap TPAK
2. Pada uji F secara simultan menjelaskan bahwa keseluruhan dari variabel independen dalam penelitian ini yaitu PDRB, Upah Minimum Provinsi, dan Inflasi daerah secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen yaitu TPAK di Pulau Sumatera. Hasil ini sesuai dengan hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini.
3. Pandangan dalam Perspektif Ekonomi Islam tentang PDRB, UMP, Inflasi Daerah dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tidak hanya dilihat sebagai angka statistik, tetapi juga sebagai bentuk ibadah dan tanggung jawab sosial. Islam memandang bekerja sebagai kewajiban yang harus dilakukan dengan niat baik dan untuk tujuan yang halal. Oleh karena itu, TPAK dalam Islam diharapkan mencerminkan kesadaran moral dan sosial, di mana pekerjaan tidak hanya memenuhi kebutuhan pribadi, tetapi juga memberi manfaat bagi masyarakat. Keadilan sosial menjadi prinsip utama dalam ekonomi Islam, yang mengajarkanbahwa setiap individu, tanpa memandang gender atau status sosial, memiliki hak yang setara untuk

berpartisipasi dalam dunia kerja. Islam juga menekankan pentingnya upah yang adil, sesuai dengan hak pekerja, untuk mendorong partisipasi angkatan kerja yang lebih besar. Dalam pandangan Islam, baik pekerjaan formal maupun informal dianggap sah dan mulia, asalkan dilakukan dengan cara yang halal. Setiap pekerjaan yang dilaksanakan dengan niat baik, untuk memperoleh nafkah halal dan memberikan manfaat kepada orang lain, dianggap sebagai amal ibadah yang mendatangkan pahala. Dengan demikian, dalam ekonomi Islam, TPAK bukan hanya diukur dari jumlah individu yang bekerja, tetapi juga dari nilai moral, keadilan, dan kontribusi sosial yang terkandung dalam setiap pekerjaan yang dilakukan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah disajikan maka selanjutnya peneliti menyampaikan saran-saran yang kiranya dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak terkait atas hasil penelitian ini. Adapun saran-saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. PDRB, Upah Minimum Provinsi, dan Inflasi Daerah haruslah diperhatikan dengan ditunjang oleh sarana dan prasarana serta kebijakan terkait dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat yang akan berdampak pada berkurangnya angka TPAK di Pulau Sumatera. Disamping itu, pengentasan TPAK melalui berbagai dimensi juga diperlukan dalam upaya mereduksi kemiskinan, seperti peningkatan akses pendidikan, kesehatan, dan peningkatan standar hidup layak. Dan lapangan pekerjaan.
2. Pemerintah Provinsi-provinsi di Pulau Sumatera untuk dapat TPAK secara multidimensi harus memperhatikan variabel-variabel yang mempengaruhinya. Berdasarkan hasil penelitian ini, ditemukan bahwa PDRB tidak berpengaruh terhadap TPAK. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun PDRB meningkat, hal tersebut tidak serta-merta menyebabkan peningkatAN TPAK. Namun, hasil penelitian juga mengungkapkan bahwa serta Upah Minimum Provinsi berpengaruh negatif signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan Multidimensi di Pulau Sumatera. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menjadi acuan

pemerintah dalam mengambil kebijakan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Pulau Sumatera. Dan serta inflasi tidak berpengaruh terhadap Tpak di Pulau Sumatera. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menjadi acuan pemerintah dalam mengambil kebijakan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Pulau Sumatera.

3. Bagi para akademik dan peneliti apabila ingin melakukan penelitian sejenis, maka dapat menggunakan variabel lain dan memperluas cakupan penelitian agar mendapatkan hasil penelitian yang lebih baik.

DAFTAR REFERENSI

Artikel Jurnal

Amir, A, 2007. Pengaruh inflasi dan pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran di Indonesia. Jurnal Inflasi dan Pengangguran, 1(1).

Aris Soelistyo Dyah Indri Widyapangesti Analisis Pengaruh PDRB, Investasi, Upah Minimum Provinsi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Pulau Jawa. Referensi Jurnal Ilmu Ekonomi (JIE) vol 6, No. 1, Februari 2022.

Ayu Maulidhia Choirunnisa, Rifki Khoirudin. Pengaruh Upah Minimum Provinsi, PDRB, IPM, Jumlah Penduduk, TPAK Terhadap Penanaman Modal Asing Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Volume 1, Nomor 12, July 2024, Halaman 327-334 E-ISSN: 3025-6704.

Boediono, Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No. 5 Ekonomi Makro, ed (Yogyakarta: BPFE, 2014).

Damanik, RapikaKesatriani, and Selna Aprilia Sidauruk. 2020. Pengaruh Jumlah Penduduk Dan Pdrb Terhadap Kemiskinan DiProvinsi Sumatera Utara Jurnal Darma Agung 28 (3) :358. doi: 10.46930 /ojsuda v28i3.800

Ikhsan dan Ihsan, "Analisis Pengaruh UMP, Inflasi, dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Provinsi Aceh," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM) Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi d an Bisnis Unsyiah 3,* no. 3 (2018): 408-419.

Mulyadi, S. 2003. Ekonomi Sumber Daya Manusia: Dalam Perspektif Pembangunan. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. Moch Heru Anggoro, "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Pertumbuhan Angkatan Kerja Terhadap Tingkat

Pengangguran Di Kota Surabaya," Jurnal Pendidikan Ekonomi (Jupe) 3, No. 3 (2015).

Buku Teks

Dendy Sugiono, "Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat," Jakarta, Indonesia: PT. Gramedia. Pustaka Utama, 2008

Gujarati, N, Damodar. 2012. Dasar-dasar Ekonometrika (Terjemahan). Buku2. Edisi 5. Penerbit Salemba: Jakarta.

Pendidikan Nasional Departemen, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2011)

Website

Badan Pusat Statistik Nasional, bps.go.id/.